

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Dwiyanto, *Menejemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, Dan Kolaboratif*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2015).

Budhi Masthuri, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2005)

Fukthoni dan Renata Arianingtiyas, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, (Jakarta Selatan: The Indonesian Legal Resource Center, 2009).

Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017)

Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mira Buana Media, 2021),

Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Wewenang Dalam Sistem Pemerintah Daerah Di Indonesia*, (Makassar: Pustaka Repleksi, 2010).

Moenir, H.A.S, *Manajemen Pelayanan Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum dalam Satu Tinjauan sosiologi*, (Yogyakarta: genta Publishing, 2009).

Sinambela, L.P, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Sirajudin et al, *Hukum Administrasi Pemerintah daerah Sejarah Asas Kewenangan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah*, (Jawa Timur: Setara Pers, 2016).

S.P Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Gunung Agung, 1990).

Suryansyah Murhaini, *Menejemen Pengawasan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: pustaka belajar, 2014).

Viktor M Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkup Aparatur pemerintah*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2011)

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

B. Jurnal

- Ananda, Alveyn Sulthony, dan Reni Putri Anggraini. "Urgensi Perluasan Kewenangan Ombudsman Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Maladministrasi Perizinan Daerah." *Jurnal Anti Korupsi* Volume 4, Nomor. 1 (2022). <https://doi.org/10.19184/jak.v4i1.31109>.
- Fazlur. Arrie, dan Fitria. "Sanksi Administrasi Bagi Perawat Yang Bekerja Tanpa Memiliki SIPP Di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi." *Mendapo Administration law*, Volume 1, Nomor 2 (2020): <https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo>.
- Mahsyar, Abdul. "Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 1, Nomor. 2 (2011):. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>.
- Muhammad Wahyu Silpa, "Peranan Ombudsman Perwakilan Sumatra Selatan Terhadap Pengawasan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang" *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya* Volume 10, Nomor 6 (2021), https://repository.unsri.ac.id/47545/3/Rama_74201_02011381621271_0024025701_0024088901
- Nabila Firstia Izzati, "Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia" Volume 26, Nomor. 28 (2020). <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/235>
- Puasa, Rafly Rilandi, Johny Lumolos, dan Neni Kumayas. "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro." *Jurnal Eksekutif* Volume 1, Nomor. 1 (2018): <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleks/ekutif/article/view/21120>.
- Purnama, Nurlita, Annisa Miskiyah, dan Muhammad Khoirul Anwar. "Upaya Pencegahan Maladministrasi Oleh OMBUDSMAN Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia." *Jurnal Relasi Publik* Volume 1, Nomor. 1 (2023): <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i1.276>.
- Putri, Felicya Astwilanda, dan M. Fachri Adnan. "Upaya Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Di Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* Volume 2, Nomor 1 (2020):. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.33>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik.

_____, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009, Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

_____, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.

_____, Undang-Undang 24 Tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah kota Jambi Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2007 Tentang administrasi Kependudukan.

Peraturan Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri

Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.

Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan

D. Website

Panrb Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi 12 Maret 2019, *sistem mekanisme dan prosedur E-KTP*, diakses dari <https://disdukcapil.jambikota.go.id/>

Ombudsman Republik Indonesia Senin, 27 Desember 2021, *Memahami Kapasitas Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik*, diakses di <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memahani-kapasitas-ombudsman-sebagai-lembaga-pengawas-pelayanan-publik> , diakses pada 13 Februari 2024

Disdukcapil Kota Surabaya Intan, 12 Juni 2023, *kenali manfaat dan pentingnya tertib administrasi kependudukan*, diakses di

<https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/06/12/kenali-manfaat-dan-pentingnya-tertib-administrasi-kependudukan/> , diakses pada 12 Februari 2024.

Ombudsman Republik Indonesia Bangka Belitung, Agung Nugraha Kamis, 18 Februari 2021, *Yuk Kenali Bentuk Bentuk Maladministrasi*, diakses di <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--yuk-kenali-bentuk-bentuk-maladministrasi>, diakses pada 12 Februari 2024